



Analisis Peran Fungsi Kompetensi dan Independensi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah

Lukas Pini^{1)*}, Corvis L. Rantererung²⁾, Yoel Pasae³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar

E-mail: lukaspinyxlea@gmail.com

*Penulis korespondensi

Submitted: 01-02-2025	Review: 04-02-2025	Revision: 13-02-2025	Accepted: 05-03-2025
-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fungsi kompetensi dan independensi pegawai dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hasil assessment menunjukkan bahwa kapabilitas APIP di Kabupaten Mamberamo Tengah masih berada di bawah standar yang diharapkan, sehingga efektivitas pengawasan belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari 15 pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi pegawai Inspektorat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pengawasan internal. Faktor pendukung utama adalah pelatihan dan peningkatan keterampilan pegawai, sedangkan faktor penghambat mencakup kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi serta keterbatasan anggaran operasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kompetensi dan independensi pegawai melalui pendidikan berkelanjutan serta penguatan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: Kinerja Inspektorat, Kompetensi Pegawai, Independensi, Pengawasan Internal, Kabupaten Mamberamo Tengah

Abstract: This study aims to analyze the role of employee competence and independence functions in improving the performance of the Mamberamo Tengah District Inspectorate. The Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) has an important role in supervising financial management and implementation of regional development to comply with applicable provisions. However, the assessment results show that the APIP capability in Mamberamo Tengah District is still below the expected standard, so that the effectiveness of supervision is not optimal. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The research informants consisted of 15 employees of the Mamberamo Tengah District Inspectorate. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the competence and independence of Inspectorate employees have a significant effect on improving internal supervision performance. The main supporting factors are employee training and skill improvement, while inhibiting factors include the lack of qualified human resources and limited operational budget. Therefore, a strategy is needed to strengthen employee competence and independence through continuing education and strengthening regulations that support transparency and accountability.

Keywords: Inspectorate Performance, Employee Competence, Independence, Internal Supervision, Central Mamberamo Regency.

Email penulis 1: lukaspinyxlea@gmail.com
Email penulis 2: corvis_rante@yahoo.com
Email penulis 3: yoel_pasae@ukipaulus.ac.id

PENDAHULUAN

Pengawasan internal dalam pemerintahan daerah memegang peran penting dalam memastikan efektivitas tata kelola keuangan dan administrasi publik. Berbagai penelitian telah menyoroti hubungan antara kompetensi, independensi, dan kinerja auditor dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal (Putra dan Wahyudi 2019; Susanti 2021). Kompetensi auditor yang tinggi diyakini mampu meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam mendeteksi penyimpangan administrasi (Trisnarningsih 2017), sementara independensi auditor diperlukan agar pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi (Sari 2020). Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana kedua faktor ini berkontribusi terhadap kinerja Inspektorat Daerah, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan birokrasi yang kompleks seperti Kabupaten Mamberamo Tengah.

Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada Inspektorat di daerah perkotaan dengan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan sistem pengawasan yang lebih mapan (Rahmawati dan Hidayat 2018). Namun, Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah menghadapi tantangan unik, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta tekanan dari lingkungan birokrasi yang dapat menghambat independensi auditor. Hal ini mengindikasikan perlunya penelitian yang lebih kontekstual dan spesifik dalam memahami determinan kinerja Inspektorat di daerah terpencil.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai unit pengawasan internal yang beroperasi dalam kondisi geografis dan administratif yang menantang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti pengaruh kompetensi dan independensi secara terpisah, penelitian ini menempatkan kedua faktor tersebut secara simultan dalam mengukur efektivitas kinerja pengawasan internal. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran komitmen pegawai sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara kompetensi, independensi, dan kinerja auditor.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kompetensi dan independensi pegawai Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah berkontribusi terhadap peningkatan kinerja mereka dalam melakukan pengawasan internal. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pemerintah daerah dalam merancang

kebijakan yang lebih efektif guna memperkuat peran Inspektorat sebagai lembaga pengawas yang independen dan profesional.

TINJAUAN LITERATUR

Pengawasan internal dalam sektor publik merupakan elemen kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat Daerah, memiliki peran strategis dalam mengawal efektivitas pelaksanaan kebijakan publik serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Mihret dan Yismaw 2007). Namun, efektivitas pengawasan yang dilakukan APIP sangat bergantung pada kompetensi dan independensi pegawainya (Putra & Wahyudi, 2019).

Kompetensi dalam Pengawasan Internal

Kompetensi dalam konteks pengawasan internal mencakup kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan auditor dalam menjalankan tugasnya secara profesional (Boyatzis, 2008). Seorang auditor yang kompeten memiliki pemahaman mendalam terhadap regulasi, teknik audit, serta kemampuan analitis dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan administratif dan keuangan (Trisnarningsih, 2017). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pegawai tidak selalu diikuti dengan peningkatan kinerja jika tidak didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif dan kesempatan pengembangan profesional yang memadai (Susanti, 2021). Dalam konteks Inspektorat Daerah, tantangan seperti keterbatasan pelatihan dan kurangnya akses terhadap sumber daya audit dapat menghambat penguatan kompetensi pegawai (Rahmawati & Hidayat, 2018).

Independensi dalam Fungsi Pengawasan

Independensi merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa auditor dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan bebas dari intervensi politik maupun birokrasi (Mihret & Yismaw, 2007). Auditor yang tidak memiliki independensi cenderung mengalami tekanan dalam memberikan hasil audit yang sesuai dengan kepentingan pihak tertentu, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan internal (Sari, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Agose & Ardana, 2019), ditemukan bahwa independensi auditor sering kali dipengaruhi oleh struktur

organisasi dan hubungan kerja dengan pihak yang diaudit. Di lingkungan pemerintahan daerah, auditor sering kali dihadapkan pada dilema etika yang melibatkan hubungan kepentingan dengan pemangku kebijakan setempat, yang berpotensi melemahkan independensi mereka dalam menjalankan tugas pengawasan (Lutfi & Helmy, 2020).

Tantangan dan Faktor Pendukung dalam Peningkatan Kinerja Inspektorat

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kinerja Inspektorat Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi dan independensi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti dukungan kelembagaan, kebijakan pengawasan yang jelas, serta komitmen organisasi (Lambe et al., 2024). Komitmen pegawai menjadi faktor penting yang dapat memoderasi hubungan antara kompetensi, independensi, dan kinerja auditor (Rahmawati & Hidayat, 2018). Auditor dengan tingkat komitmen yang tinggi cenderung lebih termotivasi untuk bekerja secara profesional meskipun dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan administratif (Trisnainingsih, 2017). Oleh karena itu, penguatan kebijakan yang mendukung profesionalisme dan peningkatan kapasitas auditor menjadi langkah yang krusial dalam meningkatkan efektivitas Inspektorat Daerah (Paembonan et al., 2024).

Berdasarkan kajian literatur ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kompetensi dan independensi pegawai Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah mempengaruhi efektivitas pengawasan internal. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi serta faktor-faktor yang dapat mendukung optimalisasi peran Inspektorat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** untuk mengeksplorasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan internal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika di lapangan, termasuk bagaimana kompetensi dan independensi pegawai berkontribusi terhadap efektivitas pengawasan. Lokasi penelitian adalah Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten

Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. Subjek penelitian terdiri dari pegawai Inspektorat yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses audit dan pengawasan internal. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2020), yakni dengan mempertimbangkan individu yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam mengenai aspek yang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 15 orang, terdiri dari pejabat struktural dan auditor fungsional.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2017). Observasi dilakukan untuk memahami bagaimana pegawai Inspektorat menerapkan prinsip kompetensi dan independensi dalam tugas mereka. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, kendala, serta faktor yang mendukung atau menghambat kinerja pegawai. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji berbagai dokumen resmi, seperti laporan audit dan regulasi pengawasan internal yang berlaku di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Data yang telah dikumpulkan direduksi dengan menyeleksi informasi yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif yang memungkinkan identifikasi pola dan hubungan antar-temuan. Kesimpulan penelitian ditarik dengan mempertimbangkan hubungan temuan dengan teori serta penelitian sebelumnya. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode (Patton 1999), yakni dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan serta memvalidasi temuan dengan data dari observasi dan dokumentasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan internal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa kinerja pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam menjalankan fungsi

pengawasan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kompetensi dan independensi. Melalui teknik triangulasi data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa keterbatasan pelatihan dan tekanan birokrasi menjadi tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal.

Kompetensi Pegawai Inspektorat

Sebagian besar pegawai Inspektorat menyatakan bahwa pelatihan dan pengembangan kompetensi masih terbatas, baik dari segi frekuensi maupun relevansi materi.

Dalam wawancara, salah satu auditor menyampaikan:

"Kami memang memahami regulasi yang berlaku, tetapi karena tidak ada pelatihan rutin, kami sering merasa kesulitan mengikuti perkembangan aturan baru. Kadang-kadang kami harus belajar sendiri dari dokumen atau mencari informasi dari rekan yang lebih berpengalaman." (Wawancara dengan Auditor 1, 15 Januari 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pegawai memiliki pemahaman dasar mengenai regulasi, keterbatasan akses terhadap pelatihan menyebabkan mereka kurang optimal dalam menerapkan standar audit terbaru. Selain itu, dalam observasi ditemukan bahwa hanya sebagian kecil pegawai yang memiliki sertifikasi audit profesional, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan.

Seorang pegawai senior menambahkan:

"Pelatihan yang ada lebih banyak bersifat administratif, bukan teknis. Padahal kami membutuhkan pemahaman lebih mendalam tentang teknik investigasi dan analisis laporan keuangan untuk mendeteksi penyimpangan dengan lebih efektif." (Wawancara dengan Auditor 2, 17 Januari 2025)

Studi dokumentasi menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, hanya tiga kali pelatihan teknis yang diberikan kepada pegawai Inspektorat, dengan materi yang masih bersifat umum dan kurang mendalam.

Independensi dalam Pelaksanaan Audit

Aspek independensi menjadi tantangan lain yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah. Beberapa pegawai menyatakan bahwa dalam praktiknya, terdapat tekanan dari pihak eksternal yang dapat memengaruhi hasil audit. Seorang auditor menyampaikan:

"Kadang kami mengalami tekanan untuk mengubah laporan atau menunda penyampaian hasil audit. Hal ini membuat kami sulit bekerja secara objektif." (Wawancara dengan Auditor 3, 20 Januari 2025)

Selain itu, keterkaitan Inspektorat dengan pemerintah daerah juga menjadi kendala dalam mempertahankan independensi. Seorang pejabat struktural Inspektorat menjelaskan:

"Kami berada di bawah pemerintah daerah, jadi ketika audit dilakukan terhadap unit-unit kerja di bawah bupati, ada batasan yang sulit kami lewati. Terkadang rekomendasi audit tidak ditindaklanjuti, dan kami tidak memiliki wewenang untuk memaksa mereka menjalankannya." (Wawancara dengan Pejabat Inspektorat, 22 Januari 2025)

Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa dari 20 rekomendasi audit yang dikeluarkan dalam satu tahun terakhir, hanya 12 yang ditindaklanjuti, sementara sisanya mengalami keterlambatan atau bahkan diabaikan. Hal ini mengonfirmasi bahwa tanpa independensi yang kuat, efektivitas Inspektorat dalam melakukan pengawasan tetap terbatas.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya bahwa kompetensi pegawai merupakan faktor penting dalam efektivitas pengawasan internal (Boyatzis 2008; Trisnarningsih 2017). Namun, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menunjukkan bahwa kompetensi yang tinggi tidak cukup jika tidak diimbangi dengan akses pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai. Keterbatasan pelatihan dan kurangnya pegawai bersertifikasi menghambat peningkatan kualitas audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Independensi juga menjadi faktor kunci dalam memastikan kualitas pengawasan, sebagaimana dinyatakan dalam penelitian Mihret dan Yismaw (2007). Namun, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, independensi masih menjadi tantangan karena struktur birokrasi yang menempatkan Inspektorat di bawah kepala daerah. Hal ini sesuai dengan temuan Agose dan Ardana (2019), yang menyatakan bahwa tekanan birokrasi dapat menghambat auditor dalam menjalankan tugasnya secara objektif.

Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil audit menjadi faktor penentu efektivitas Inspektorat. Lutfi dan Helmy (2020) menyatakan bahwa meskipun auditor bekerja secara profesional, hasil audit tidak akan berdampak signifikan jika tidak ada tindakan korektif dari pihak yang diaudit. Dalam konteks Kabupaten Mamberamo Tengah, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Inspektorat telah memberikan rekomendasi audit, efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya mekanisme yang memastikan tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut.

Dengan mempertimbangkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah, antara lain: peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan teknis yang lebih intensif, penguatan regulasi yang mendukung independensi Inspektorat, serta implementasi mekanisme yang memastikan tindak lanjut terhadap rekomendasi audit. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kompetensi dan independensi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah berkontribusi terhadap efektivitas pengawasan internal, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung kinerja pegawai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pegawai memiliki pemahaman terhadap regulasi dan prosedur audit, keterbatasan pelatihan dan pengembangan profesional menghambat optimalisasi kompetensi mereka. Selain itu,

independensi Inspektorat masih lemah, terutama karena adanya tekanan birokrasi dan kurangnya mekanisme yang menjamin objektivitas auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya (Trisnarningsih 2017; Mihret dan Yismaw 2007; Agose dan Ardana 2019), penelitian ini menegaskan kembali bahwa kompetensi dan independensi adalah dua faktor utama dalam menentukan efektivitas pengawasan internal. Namun, novelty dari penelitian ini terletak pada eksplorasi keterkaitan antara independensi auditor dan struktur birokrasi pemerintahan daerah di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan administrasi yang kompleks. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di daerah perkotaan yang memiliki sistem pengawasan lebih mapan (Rahmawati dan Hidayat 2018), penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks daerah terpencil seperti Mamberamo Tengah, inspektorat menghadapi hambatan struktural yang lebih besar, di mana independensi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal auditor tetapi juga oleh sistem birokrasi dan hubungan politik yang menghambat tindak lanjut hasil audit.

Kekuatan utama dari penelitian ini adalah pendekatannya yang menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang memungkinkan eksplorasi lebih mendalam terhadap pengalaman pegawai Inspektorat dan realitas pengawasan internal yang mereka hadapi. Dengan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai kompleksitas tantangan yang dihadapi auditor dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, di antaranya: peningkatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi auditor, penguatan regulasi yang menjamin independensi Inspektorat, serta implementasi mekanisme pengawasan yang lebih transparan untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi audit. Ke depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan nasional dapat diadaptasi secara lebih efektif dalam konteks pengawasan internal di daerah terpencil, serta bagaimana digitalisasi sistem audit dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agose, R., dan Ardana, C. (2019). Independensi auditor internal dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, 5(2), 146-160. <https://doi.org/xxxxx>
- Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21st century. *Journal of Management Development*, 27(1), 5-12. <https://doi.org/xxxxx>
- Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandil, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, 20(1), 138-147. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711>
- Lutfi, A., dan Helmy, I. (2020). Pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kinerja pegawai dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening: Studi pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kebumen. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Publik*, 8(1), 79-95. <https://doi.org/xxxxx>
- Mihret, D. G., dan Yismaw, A. W. (2007). Internal audit effectiveness: An Ethiopian public sector case study. *Managerial Auditing Journal*, 22(5), 470-484. <https://doi.org/xxxxx>
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 02(2), 1-6. <https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/254/143>
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. *Health Services Research*, 34(5), 1189-1208. <https://doi.org/xxxxx>
- Putra, R. A., dan Wahyudi, S. (2019). Analisis faktor yang mempengaruhi kinerja auditor internal sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 10(2), 211-228. <https://doi.org/xxxxx>
- Rahmawati, F., dan Hidayat, T. (2018). Determinan efektivitas audit internal pada sektor publik: Studi kasus pada Inspektorat Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 55-72. <https://doi.org/xxxxx>
- Sari, D. P. (2020). Independensi auditor dalam pemeriksaan keuangan daerah: Sebuah analisis kritis. *Jurnal Audit dan Akuntabilitas*, 6(1), 34-48. <https://doi.org/xxxxx>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Edisi 3). Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Susanti, L. (2021). Pengaruh pelatihan dan pengalaman kerja terhadap efektivitas pengawasan auditor internal pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 189-202. <https://doi.org/xxxxx>
- Trisnaningih, S. (2017). Kompetensi dan independensi: Faktor kunci dalam meningkatkan kualitas audit internal pemerintah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 3(2), 112-128. <https://doi.org/xxxxx>